

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corporate of Governance adalah kualitas perusahaan yang mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan. Indonesia berada pada urutan 10 perusahaan di negara berkembang terbawah Asia dalam penegakan aturan tata kelola perusahaan, tercantum dalam publikasi The McKinsey Quarterly. Tata kelola yang baik dalam penyediaan informasi dapat berperan besar pada perusahaan. Keterbukaan dan pengungkapan dapat menurunkan biaya pencarian investor dari luar, analisis sekuritas dan partisipan lainnya di pasar saham. (Lukas,2011)

Corporate Governance (CG) adalah elemen dasar bagi perusahaan untuk membangun organisasi yang kuat, fleksibel, dan berkelanjutan yang memberikan nilai tambah bagi seluruh stakeholder. Dalam governansi korporat dijelaskan bahwa Organ Perusahaan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh untuk menjalankan, mengelola dan menguatkan platform bisnis perusahaan secara berkelanjutan dan menciptakan nilai bagi stakeholder. Selain itu governansi korporat melalui penerapan prinsip-prinsip GCG harus menjadi landasan dalam setiap proses penguatan platform bisnis untuk memastikan adanya nilai tambah bagi stakeholder dengan tetap memperhatikan nilai-nilai etika, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. (annual report CGPI, 2018) *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) memberikan penghargaan kepada sejumlah perusahaan dengan menerapkan *Good Corporate Govetnance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. Peghargaan ini bertujuan untuk mendorong perusahaan menerapkan GCG dan mampu memberikan keuntungan lebih kepada investor dalam memilih saham.

Penelitian tentang corporate governance yang dipengaruhi koneksi politik pernah diteliti sebelumnya, Dicko (2017) Qian et. al (2010) menyatakan koneksi politik berpengaruh negatif signifikan terhadap *corporate governance*, menunjukkan bahwa secara politis perusahaan yang terhubung cenderung tidak berupaya meningkatkan kualitas *corporate governance*. Chaney dkk. (2011) meneliti sampel 4.954 perusahaan dari 19 negara dan menemukan itu perusahaan yang memiliki perusahaan terkoneksi semakin buruk dalam pengungkapan informasi keuangan mereka dibandingkan ke perusahaan lain. Leuz dan Gee (2006) perusahaan di Indonesia dalam menyusun strategi bersaing cenderung mencari dan memanfaatkan peluang dalam lingkungan bisnis, salah satunya melalui koneksi politik.

Selain itu, Pranoto dan Widagdo (2016) berpendapat bahwa perusahaan yang mempunyai koneksi politik adalah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah. Menurut Gomez dan Jomo (2009), perusahaan yang mempunyai koneksi politik merupakan perusahaan atau konglomerat yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah dapat diartikan sebagai perusahaan milik pemerintah, yaitu perusahaan yang berbentuk BUMN atau BUMD. Konglomerat (pemilik) yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah adalah konglomerat atau pemilik perusahaan merupakan tokoh politik terkemuka (Gomez dan Jomo, 2009).

Perusahaan dengan kepemilikan keluarga terjadi pergeseran konflik kepentingan dari konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen menjadi konflik kepentingan antara pemegang saham minoritas dan mayoritas (Sheleifer et al., 1997). Pemegang saham mayoritas akan mampu mengarahkan kebijakan perusahaan untuk mencapai kepentingannya meskipun harus mengorbankan kepentingan pemegang saham minoritas yang dikenal sebagai tindakan ekspropriasi. Insentif tindakan ekspropriasi yang terjadi akan semakin

meningkat apabila kepemilikan diperoleh melalui rantai kepemilikan piramida seperti di Indonesia.

Kondisi kepemilikan perusahaan di Indonesia dijelaskan oleh Arifin (2003), Gul dan Tsui (2004), Siregar dan Utama (2006 dan 2008), dan Achmad dkk (2011) sebagai perusahaan-perusahaan yang didominasi oleh kepemilikan keluarga. Siregar dan Utama (2008) memperoleh kesimpulan bahwa perusahaan yang dikuasai keluarga memiliki masalah keagenan tidak seserius pada kepemilikan lainnya. Penelitian Claessens dkk (1999) menemukan bahwa dari 178 perusahaan di Indonesia terdapat 67% perusahaan (tertinggi dari 9 negara Asia Timur) dimiliki keluarga secara ultimate (tunggal) melalui struktur pyramid ownership. Kemudian Achmad dkk (2011) menyebut 66% perusahaan Indonesia dimiliki keluarga.

Arifin (2003), telah menggunakan berbagai definisi kepemilikan keluarga untuk kasus di Indonesia. Definisi tepat dengan kondisi di Indonesia adalah kepemilikan keluarga yang terdiri dari kepemilikan individu dan perusahaan lokal. Meskipun kemungkinan keluarga menggunakan investasi berupa perusahaan asing, tetapi karakteristik pengendalian perusahaan asing tersebut berbeda dengan kepemilikan individu dan perusahaan lokal. Adanya kepemilikan mayoritas akan memunculkan kemungkinan konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Konflik ini dapat dilihat dalam kerangka masalah agensi. Sebagai prinsipal dalam hal ini adalah pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas yang ikut mengelola perusahaan bertindak sebagai agen. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengkaji bagaimana masalah keagenan yang muncul pada perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga di Indonesia.

Perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi, manfaat dari membangun koneksi politik menjadi jauh lebih besar karena pemegang saham mayoritas dapat menggunakan koneksi politik yang ia miliki untuk menghindari hukuman dari kegiatan ekspropriasi. Faccio (2006) menjelaskan bahwa dorongan perusahaan untuk memiliki koneksi politik telah mendapat perhatian khusus dari para pengamat

ekonomi dikarenakan adanya indikasi perlakuan istimewa dari pemerintah, terutama bagi perusahaan yang dimiliki langsung oleh pejabat atau orang yang mempunyai posisi penting di pemerintahan. Perusahaan terkoneksi politik apabila minimal salah satu pemegang saham utama atau salah satu pemimpin Presiden, Wakil Presiden, CEO, Chairman, atau sekretaris yang merupakan menteri, anggota parlemen, berkorelasi dengan politikus atau partai politik (Faccio, 2006). *Corporate governance* untuk menilai risiko dan kualitas tata kelola perusahaan dengan melihat dari data BEI. Melihat dari koneksi politik yang terhubung jika pemegang saham mayoritas atau salah satu penjabat eksekutif, anggota dewan atau anggota pemerintah. Adanya hubungan koneksi politik-direksi, koneksi politik-eksekutif dengan melihat jumlah direksi dan jumlah eksekutif. Perusahaan yang terkoneksi politik akan menggunakan kendali mereka untuk melobi politik sehingga standar aturan dan penegakan tata kelola perusahaan berkualitas. (Haque et al 2011)

Penelitian ini menguji pengaruh *corporate governance* dengan koneksi politik dan struktur kepemilikan menggunakan model, yang masing-masing mengukur koneksi politik dengan cara tertentu. Itu perlu untuk membuat model terpisah, meskipun berkorelasi kuat. Dengan melihat moderasi kepemilikan keluarga dalam pengaruh antara koneksi politik dan *corporate governance* pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap *corporate governance*?
2. Apakah kepemilikan keluarga memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap *corporate governance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh bukti empiris adanya pengaruh koneksi politik dan struktur kepemilikan keluarga terhadap *corporate governance*.
2. Untuk memperoleh bukti empiris adanya kepemilikan keluarga memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap *corporate governance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan berbagai manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau tambahan bukti empiris mengenai hubungan koneksi politik, kepemilikan keluarga dan *corporate governance*. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kontribusi ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan *corporate governance*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan
- b. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan dampak koneksi politik dan kepemilikan keluarga terhadap *corporate governance*.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan menambah wawasan bagi pembaca.

1.5 Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi dengan judul “Koneksi Politik dan *Corporate Governance* dengan Dimoderasi *Family Ownership*” tersusun dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah penelitian yang mendasari penelitian ini yaitu mengkaji adanya hubungan koneksi politik, *family ownership* dan *corporate governance*. Dari latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah penelitian tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian teoritis dan manfaat penelitian praktis.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang dipakai oleh peneliti dalam mendukung penelitian diantaranya mengenai koneksi politik, *family ownership*, dan *corporate governance*. Selain itu, terdapat bahasa tentang penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian dari uraian tersebut, peneliti merumuskan beberapa pengembangan hipotesis.

BAB 3: METODE PENELITIAN,

Bab ini peneliti menguraikan rancangan penelitian yang berisi jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, menguraikan identifikasi variabel, menguraikan jenis dan sumber data, menjelaskan mengenai pemilihan populasi dan sampel, teknis analisis dan pengujian hipotesis.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan dan menguraikan hasil penelitian yang berisi gambaran umum subjek dan objek penelitian, analisis statistik deskriptif, analisis model dan pembuktian hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan dari penelitian yang mana juga sebagai jawaban dari rumusan masalah atau hipotesis yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk penelitian selanjutnya.